

ANALISIS PERMASALAHAN PEMERATAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SINTANG

Thomas Joni Verawanto Aristo

STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

Jl. Pertamina KM 4, Sengkuang, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia

thomaspaoh@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan, dan Ketua PGRI (Informan Kunci), dan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru (Informan Penunjang). Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah model analisis Spradley untuk menganalisis permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama. Pertama, pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang terkendala akibat keadaan geografis dan sarana prasarana yang kurang. Kedua, partisipasi pendidikan di Kabupaten Sintang belum terlaksana maksimal karena program wajib belajar hanya mencapai 7 tahun. Ketiga kualifikasi guru di Kabupaten Sintang masih banyak belum yang memenuhi standar. Keempat, anggaran pendidikan yang berupa dana BOS belum memadai untuk dikelola oleh sekolah di daerah.

Kata Kunci: pemerataan, pendidikan dasar, guru

AN ANALYSIS OF EQUALITY MATTER IN EDUCATION IN SINTANG REGENCY

Abstract

The purpose of this study was to determine the equality in education in Sintang Regency that covered the implementation of basic education. This was a qualitative study using case study approach. The subject was the Head of Education Department, the Head of Education Department district, and the Chairman of PGRI (Key Informant), and the School Superintendent, principal, and teachers (Supportive Informant). Data collection technique used documentation and interviews. Analysis of the data was an analysis of Spradley's model to analyze equality matter in education in Sintang. This research results in four major findings. First, the implementation of equality in education was constrained because of geographical condition and lack of infrastructure. Second, the participation of education in Sintang was only reached 7 years. Third, many teacher's qualifications is still not fulfilling the standard. Fourth, education budget that form of BOS fund is not adequate to manage by schools in rural area.

Keywords: equality, basic education, teacher

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.21831/amp.v7i1.10923>

Pendahuluan

Pendidikan adalah sebuah investasi masa depan bagi sebuah negara yang sedang berkembang. Indonesia sebagai salah satu negara yang sedang berkembang telah menerapkan salah satu tujuan yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, gender, dan kondisi geografis. Pendidikan secara teknis seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia sampai ke pelosok-pelosok nusantara. Tetapi pada kenyataannya banyak di daerah Indonesia yang masih mengalami keterpurukan dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia yaitu berupa kesulitan dalam mendapatkan akses pendidikan, atau bisa dikatakan pemerataan pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah dirasakan kurang adil oleh anak-anak didik yang sebagian besar berada di daerah pedalaman nusantara.

Pemerataan pendidikan merupakan bagian dari program desentralisasi. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menuju desentralisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi” (Presiden Republik Indonesia, 2014). Sementara itu UNESCO (2005, p. 1) mengartikan desentralisasi sebagai “*An essential feature of the on-going modernization and reform of public sector management*”. Desentralisasi merupakan sebuah pendelegasian tanggung jawab dan kekuasaan dari atasan kepada bawahan yang merupakan wujud

suatu reformasi baru dalam manajemen modern. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga pemerataan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Pemerataan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah Indonesia mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dan ketidakadilan disebabkan oleh aksesibilitas layanan pendidikan yang belum merata, terbatasnya tenaga pendidik, infrastruktur wilayah yang belum memadai, prasarana jalan, dan sarana transportasi yang masih belum terpenuhi. Selain dikarenakan akses pendidikan yang terbatas, kendala dari pemerataan pendidikan adalah faktor finansial atau keuangan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mahal biaya yang dikeluarkan oleh peserta didik tersebut.

Salah satu yang menjadi kendala pemerataan pendidikan adalah ketidaktercapaian program wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Menurut Hasanah & Jabar (2017, p. 238) mengatakan bahwa ada beberapa hambatan program wajib belajar tahun yakni daya partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, minat anak dan kesadaran orangtua kurang terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan, masih adanya anak putus sekolah, sosialisasi program wajib belajar yang kurang maksimal, dan ketidaktepatan subsidi pemerintah terkait pendataan masyarakat miskin sehingga berpengaruh pada pembagian kartu serta kurangnya *cross check*.

Salah satu daerah yang menjadi sorotan permasalahan pemerataan pendidikan adalah Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang (2010, p. V-5) telah menetapkan visi, tujuan, dan sasaran pendidikan yang terdapat pada Rencana Pempa-

ngunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2011-2015 yaitu "Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dan menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua". Beberapa aspek yang paling disignifikan dalam pemerataan atau desentralisasi pendidikan adalah pendistribusian tenaga pendidik, kualitas tenaga pendidik, tingkat partisipasi pendidikan, kesiapan instansi pendidikan dalam menerapkan desentralisasi, dan alokasi anggaran pembangunan sektor pendidikan. Aspek-aspek tersebut penting untuk diperhatikan dalam mengetahui permasalahan pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang sudah seharusnya lebih memperhatikan kelancaran dalam menjalankan implementasi program pemerataan, sesuai dengan penerapan otonomi daerah yang juga menjalankan kebijakan secara desentralistik.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan desentralisasi atau pemerataan adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia (pendidik dan tenaga kependidikan), sumber daya keuangan, dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Selain itu, keberhasilan dari pemerataan pendidikan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia yang nanti berperan sebagai pemimpin, manajer, staf, dan pelaksana pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab membangun infrastruktur pendidikan di daerah tersebut. Permasalahan utama tidak hanya terdapat pada pengembangan kapasitas tetapi lebih kepada penyebaran secara merata pendidik dan tenaga kependidikan tersebut keseluruh daerah yang ada di Kabupaten Sintang.

Pada tahun 2010 tingkat partisipasi sekolah Kabupaten Sintang masih pada kategori yang rendah pada pendidikan menengah atas yaitu baru mencapai 27,99%, sedangkan angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar dan menengah pertama mencapai angka yang baik, yaitu rata-rata 85% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang, 2013). Selanjutnya, pada tahun 2013 Kabupaten Sintang memiliki guru SD sebanyak 2.833 orang, guru-guru SLTP sebanyak

1.107 orang, dan guru SLTA sebanyak 744 orang yang tersebar di daerah. Sementara itu jumlah sekolah untuk SD sebanyak 354 unit, SLTP sebanyak 104 unit, dan SLTA sebanyak 43 unit, data tersebut menunjukkan bahwa rasio guru SD dan sekolah adalah 1: 8, untuk guru SLTP yaitu 1: 10, dan SLTA yaitu 1: 17. Dari data rasio tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata SD Kabupaten Sintang menyediakan 8 guru untuk 1 sekolah, sedangkan SLTP Kabupaten Sintang menyediakan 10 guru untuk 1 sekolah.

Berdasarkan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dinyatakan bahwa "Setiap SD/MI menyediakan 6 enam orang guru untuk setiap satuan pendidikan, sedangkan SLTP menyediakan 1 (satu) orang guru untuk tiap mata pelajaran" (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga pengajar yang tersedia bagi pendidikan dasar di Kabupaten Sintang sudah mencukupi. Tetapi untuk membentuk sekolah menjadi lebih efektif, SD dan SLTP juga harus menambah 3 orang personil yang berperan sebagai 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru agama, dan 1 orang guru olahraga. Dengan tambahan 3 personil tersebut, sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang masih memerlukan tambahan tenaga pengajar agar indikator standar pelayanan minimal dapat dipenuhi.

OECD (2015, p. 217) menambahkan "*There is a general oversupply of teachers in Indonesia and teachers are unevenly distributed throughout the education system. Some schools have teacher shortage and there are large discrepancies between districts*". Penelitian yang dilakukan oleh OECD membuktikan bahwa banyak terjadi kesenjangan dan ketidakmerataan dalam pendistribusian guru-guru di Indonesia, ada beberapa sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pengajar dan beberapa sekolah lainnya memiliki guru-guru yang berlebihan. Kabupaten Sintang juga mengalami kejadian yang sama, beberapa daerah kelebihan guru-guru sedangkan daerah lainnya masih banyak membutuhkan guru-guru. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip desentralisasi pendidikan

an yang mengedepankan pemerataan pendidikan di daerah-daerah Indonesia. Selain itu, berdasarkan survey kualifikasi guru-guru di Kabupaten Sintang yang belum berijazah S1/DIV menunjukkan 51,93% pada tahun 2013, dengan jumlah guru yang berkualifikasi S1/DIV sebanyak 1.797 orang dan guru yang belum memiliki berijazah S1/DIV sebanyak 1.941 (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat, 2013). Data tersebut menunjukkan bahwa guru-guru yang berkualifikasi S1/ DIV masih belum mencapai 70% dari standar yang ditetapkan.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang (2013, p. 4) Rata-rata lama sekolah tahun 2013 di Kabupaten Sintang menunjukkan angka 6,74 tahun, yang berarti secara umum rata-rata pendidikan penduduk di Sintang hanya sampai kelas 6 SD atau berhenti ketika 1 SMP. Data tersebut ditunjukkan oleh besarnya angka partisipasi sekolah 7-12 tahun yang mencapai 96,74%. Angka partisipasi sekolah 13-15 tahun lebih rendah dibandingkan angka partisipasi sekolah 7-12 tahun, yaitu sekitar 90,78%. Sedangkan usia 16-18 tahun merupakan angka yang paling rendah yaitu sekitar 50,00%. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, angka partisipasi pendidikan tidak mengalami peningkatan secara signifikan, bahkan mengalami penurunan angka partisipasi sekolah di jenjang pendidikan berikutnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang (2010, p.VIII-8) mencanangkan indikator kinerja angka harapan lama sekolah sebesar 9 tahun dan untuk angka partisipasi sekolah sebesar 99,75%. Dengan demikian, APS dan rata-rata lama sekolah di kabupaten Sintang belum memenuhi target. Menurut OECD (2015, p.116) sekolah di beberapa daerah menggunakan dana BOS untuk merekrut guru-guru spesialis agar dapat mengajar siswa di sekolah serta menggunakan dana tersebut untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang Yat Lukman Riberu menyatakan bahwa "Dana BOS belum cukup untuk pendanaan dan pengembangan sekolah, sehingga memerlukan dukungan dari

masyarakat" (Andi, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana pendidikan belum dikelola secara efektif, sehingga anggaran pendidikan masih terbatas dalam melaksanakan program pemerataan pendidikan.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014, p. 73) ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan, yaitu "akses pendidikan yang belum merata, masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4, dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid". RPJM Kabupaten Sintang (2010, p. IV-8) juga menjelaskan permasalahan yang berupa "belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru". Berdasarkan kondisi tersebut, di mana permasalahan pemerataan pendidikan yang terjadi di Kabupaten Sintang cenderung tidak mengalami perubahan ke arah perbaikan, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini akan meneliti Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang telah menetapkan aturan yang mewajibkan pendidikan 9 tahun, tetapi pada kenyataannya banyak peserta didik yang berhenti sekolah pada jenjang SD atau tidak menyelesaikan pendidikan SLTP. Dengan demikian, penelitian ini memiliki suatu kekhasan dan fenomena yang unik untuk dianalisis, sehingga penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai metode penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sintang, yang terletak di bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sam-

pai Juni 2016. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang dipilih menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan sebagai informan utama, sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan dan Ketua PGRI Sintang sebagai informan pendukung. Dan Pengawas Sekolah sebagai informan utama, sedangkan Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sintang, Kepala Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Sintang, dan guru-guru sebagai informan pendukung.

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh (Spradley, 2007, p. 120), analisis data tersebut terdiri dari empat tahapan, yaitu sebagai berikut. Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Pada tahapan kedua adalah analisis taksonomi yang melanjutkan analisis awal berupa domain-domain atau kategori yang telah ditemukan. Pada tahapan yang ketiga adalah analisis komponensial yang merupakan kelanjutan dari analisis domain yang telah ditetapkan sebagai *cover term*. Pada saat itu, domain-domain tersebut akan berbentuk atau menjadi elemen yang serupa dan serumpung. Analisis tema budaya merupakan tahapan terakhir dalam analisis data. Analisis tema budaya adalah tahapan yang mencari keterkaitan antara domain. Sehingga akan tersusun suatu pondasi yang menggambarkan situasi sosial ataupun objek penelitian yang sebelumnya masih belum jelas, dan setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan jelas.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang

Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mencatat bahwa pada tahun 2015 gedung sekolah yang terdapat di Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: SD/MI berjumlah 421 unit dengan jumlah siswa 60.485 orang dan jumlah pendidik 3.848 orang, sedangkan SMP/MTs berjumlah 121 unit

dengan jumlah 21.026 orang dan jumlah pendidik 1.300 orang. Kecamatan Sepauk merupakan daerah yang paling banyak memiliki SD, yaitu berjumlah 45 unit dengan jumlah murid sebanyak 7.158 dan jumlah guru sebanyak 254. Sedangkan untuk SMP, Kecamatan Sintang sebagai kota pusat kabupaten yang memiliki SMP paling banyak, yaitu 20 unit dengan 335 guru dan 5.677 murid. Setiap kecamatan memiliki setidaknya 20 unit SD dan 8 unit SMP.

Keadaan geografis Kabupaten Sintang yang mempunyai wilayah luas serta kondisi jalan yang belum memadai membuat kinerja pendidikan tidak bekerja secara maksimal. Keadaan geografis yang jauh menyebabkan ketidakterjangkauan sekolah-sekolah bagi peserta didik. Hal tersebut juga ditambah dengan transportasi umum yang belum memadai, sehingga pelaksanaan pendidikan menjadi tidak bekerja dengan maksimal. Selain kondisi wilayah yang menjadi kendala dalam pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana di sekolah-sekolah juga mengalami kesenjangan dan kekurangan di berbagai kecamatan.

Pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional. Perkembangan pendidikan dasar yang menjadi prioritas program pendidikan negara juga berjalan dengan prosedur serta ketetapan yang berlaku, tetapi yang masih menjadi kendala dalam operasional adalah kondisi geografis wilayah dan sarana prasarana masih menjadi hambatan yang memerlukan perhatian ekstra pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Analisis Partisipasi Pendidikan Dasar

Partisipasi pendidikan dasar yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sintang untuk SD telah mencapai target nasional (95,59%), tetapi untuk SMP, Kabupaten Sintang belum memenuhi target nasional (73,88%). Jumlah partisipasi pendidikan dasar pada tahun 2015/2016 jika dilihat secara kecamatan, untuk SD hampir semua kecamatan mencapai 99%, sedangkan untuk SMP terdapat 4 kecamatan yang partisipasi-

nya masih rendah, yaitu Ketungau Hilir (59,39%), Ketungau Tengah (59,69%), Kayan Hulu (66,74%), dan Sepauk (68,97%).

Salah satu yang menjadi ukuran kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang adalah persentase kelulusan dan putus sekolah. Pada tahun 2015/2016 jumlah lulusan SD yang terendah adalah Kecamatan Binjai Hulu (223 orang), dan untuk SMP jumlah lulusan yang terendah juga di alami Binjai Hulu (154 orang), sedangkan untuk putus sekolah, SD di Kecamatan yang paling besar adalah Ambalau (23 orang) dan SMP di Kecamatan yang paling besar adalah Sepauk (19 orang).

Partisipasi pendidikan yang rendah diakibatkan oleh motivasi siswa yang masih kurang, hal tersebut disebabkan dari kondisi geografis Kabupaten Sintang yang jauh dan transportasi yang belum memadai serta keterbatasan ekonomi. Peserta didik yang sudah merasa cukup berumur dan kuat untuk bekerja akan lebih memilih untuk berhenti sekolah serta mencari penghasilan sendiri. Jarak tempuh sekolah yang jauh membuat peserta didik menjadi lebih memilih untuk bekerja daripada berangkat sekolah.

Analisis Kualifikasi Guru

Perekrutan guru di Kabupaten Sintang ditetapkan untuk mempunyai kualifikasi S1 pada bidang pendidikan, sehingga jika beberapa guru yang belum memenuhi standar tersebut diwajibkan untuk menempuh pendidikan kembali atau tidak diperbolehkan untuk mendapatkan sertifikasi. Selain kualifikasi S1, guru-guru di Kabupaten Sintang juga masih belum mencapai standar dalam tes UKG yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut data dari Neraca Dinas Pendidikan Daerah Sintang, pada tahun 2015 guru-guru SD yang belum memenuhi kualifikasi sebanyak 35% dengan rerata UKG sebesar 50,17, sedangkan guru-guru SMP sebanyak 14% dengan UKG sebesar 55,89.

Perekrutan dan kualifikasi guru merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pemerataan pendidikan. Perekrutan guru yang memenuhi standar serta pelatih-

an-pelatihan yang rutin dilakukan akan memberikan kontribusi dalam memperbaiki kualitas guru sekolah. Kualitas pendidikan akan berkembang maju dengan guru-guru yang berkualitas serta kemampuan yang memenuhi standar pendidikan.

Analisis Pendistribusian Guru

Menurut Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang pada tahun 2015, Sintang memiliki guru sebanyak 5.393 orang dengan rasio perbandingan terhadap murid, yaitu SD 1: 16, dan SMP 1: 15. Kecamatan Binjai Hulu adalah wilayah yang paling sedikit memiliki guru SD, yaitu 126 orang, sedangkan Kecamatan Ambalau adalah wilayah yang paling sedikit memiliki guru SMP, yaitu 29 orang. Dilihat dari jumlah murid, Kecamatan Sepauk memiliki murid yang terbanyak kedua setelah Kecamatan Sintang tetapi guru-guru yang disediakan hanya berjumlah 254 orang, jika dibandingkan dengan Serawai yang memiliki murid yang tidak terlalu banyak tetapi memiliki guru yang hampir sama jumlahnya. Hal tersebut juga terjadi dengan kecamatan lainnya, seperti Ketungau Tengah dan Kayan Hulu.

Pendistribusian yang tidak efektif disebabkan oleh pendataan yang belum sesuai dengan data ataupun kondisi daerah. Selain itu, guru-guru di daerah merasa bahwa sekolah-sekolah yang di pedalaman atau daerah tidak mendapatkan kesempatan dan kelayakan yang sama dengan di perkotaan. Hal tersebut membuat guru-guru lebih cenderung untuk mengajar dan mengabdikan di perkotaan.

Analisis Anggaran Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang

Data dari Neraca pendidikan daerah Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa total APBD yang didapatkan oleh Kabupaten Sintang berjumlah 1,41 triliun rupiah, dan untuk pembiayaan pendidikan Kabupaten Sintang mendapatkan alokasi APBD sebesar 5,79% yaitu berjumlah 84,1 miliar rupiah. Alokasi sebesar 5,79% tersebut digunakan untuk 5.393 guru, 96.778 siswa, dan 571 sekolah. Kabupaten Sintang juga mempersiapkan dana BOS yang diberikan

kepada sekolah dengan kesesuaian jumlah murid di sekolah, yaitu masing-masing siswa mendapatkan Rp869.400.

Dana BOS yang dianggarkan pemerintah untuk pendanaan pendidikan memang belum efektif, tetapi banyak sekolah yang mengelola dana tersebut agar dapat dipergunakan secara maksimal. Permasalahan yang terpenting adalah sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan pedalaman merasakan kesulitan dalam pengambilan dana serta jumlah murid yang terbatas juga mempengaruhi anggaran yang akan diterima.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, disampaikan pembahasan penelitian sebagai berikut.

Analisis Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang

Pemerataan pendidikan adalah sebuah pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan bagi semua kalangan. Menurut Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013, p. 39) pemerataan pendidikan yang terlampir pada visi dan misi menjelaskan tentang 6K, yaitu Ketersedian, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, Kepastian/Keterjaminan, dan Kelestarian. Holsinger & Jacob (2008, p. 93) juga menyatakan bahwa jarak antara rumah dan sekolah merupakan sebuah permasalahan utama yang mempengaruhi partisipasi pendidikan peserta didik. Selain itu, ketidakadaan transportasi yang mendukung peserta didik membuat mereka harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mencapai sekolah, hal tersebut membuat orangtua mengizinkan untuk mengikuti kegiatan belajar setelah menginjak usia yang lebih tua ataupun mereka lebih memilih untuk tidak sekolah dan memilih untuk bekerja.

Pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan berkembang dengan baik setiap tahunnya. Sekolah-sekolah telah dibangun di tiap-tiap kecamatan dan fasilitas mengajar disediakan untuk menunjang kegiatan belajar.

Permasalahan yang masih terjadi adalah keterjangkauan wilayah dan ketersediaan sarana prasarana. Beberapa kecamatan mengalami kesulitan dalam melaksanakan pendidikan, dikarenakan kondisi geografi yang jauh, jalan yang rusak, dan kondisi alam yang sering berubah. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pemerataan pendidikan menjadi tidak terpenuhi secara maksimal dan beberapa desa menjadi tidak terjangkau oleh pendidikan. Selain itu, beberapa sekolah di kecamatan mengalami kesenjangan dalam ketersediaan sarana prasarana. Hal tersebut menyebabkan sekolah-sekolah menjadi tertinggal dan tidak dapat melaksanakan kegiatan mengajar dengan efektif.

Analisis Partisipasi Pendidikan Dasar

Menurut Levin (2003, p. 7) ada dua hal yang terpenting pada pemerataan pendidikan, yaitu *access* dan *participation*. Belcastro (2015, p. 429) menambahkan negara yang tidak sanggup menjaga *quality education opportunities for all children* merupakan sebuah kegagalan dalam demokrasi. Pemerataan pendidikan jika dilihat dari pelaksanaannya terbagi menjadi tiga kategori yang paling penting dalam pendidikan, yaitu kesempatan belajar atau sekolah, mutu atau kualitas pendidikan, dan akses yang merata. Program pendidikan dasar yang diselenggarakan di Kabupaten Sintang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi yang menjadi penyebab masih adanya anak putus sekolah dan belum tercapai program tersebut adalah motivasi peserta didik yang masih rendah. Pendidikan yang merupakan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri bagi peserta didik membutuhkan sebuah kondisi yang lebih baik dan menguntungkan bagi mereka. Permasalahan kondisi wilayah serta keadaan ekonomi membuat mereka lebih memilih untuk berhenti sekolah dan bekerja membantu orang tua.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka partisipasi pendidikan di Kabupaten Sintang belum terlaksana dengan maksimal dan masih banyak peserta didik yang putus sekolah serta belum mendapatkan pendi-

dikan yang baik. Ada dua aspek yang menjadi permasalahan pada kurangnya partisipasi pendidikan, yaitu akses dan motivasi. Akses pendidikan yang tidak merata dan tidak terjangkau menyebabkan peserta didik lebih baik untuk tidak bersekolah daripada menempuh perjalanan yang jauh, serta motivasi peserta didik yang kurang dikarenakan tidak adanya sosialisasi pendidikan dari pemerintah menyebabkan mereka lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan pendidikan.

Analisis Kualifikasi Guru

Menurut Voicu (2014, p. 34) tahapan perekrutan dan penyeleksian yang dilakukan harus memerhatikan kompetensi dan kemampuan dari calon guru tersebut, banyak calon guru yang secara teori sudah siap tetapi secara praktik mereka banyak mengalami kekurangan.

Perekrutan guru-guru di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan dengan baik dan diseleksi sesuai dengan prosedur serta aturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan perekrutan dan penyeleksian guru-guru baru yang mempunyai kualifikasi S1/DIV bagi sekolah-sekolah di daerah-daerah Sintang. Walaupun beberapa pendidik yang diangkat oleh pemerintah masih berkualifikasi di bawah standar, pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian dan prestasi yang telah mereka lakukan. Kualitas pendidik di Kabupaten Sintang masih belum memenuhi standar yang pemerintah targetkan. Menurut tes UKG yang telah dilaksanakan guru-guru SD di Kabupaten Sintang mendapatkan perolehan nilai di bawah standar pemerintah. Para guru di Kabupaten Sintang memerlukan pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan kompetensi mengajar, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bekerja ekstra agar dapat mengembangkan kualitas pendidik, dan yang paling utama adalah guru-guru yang berada di daerah pedesaan dan pedalaman.

Analisis Pendistribusian Guru

Menurut Hammond & Sykes (1999, p. 190) permasalahan utama dalam pendistri-

busian dan penempatan guru-guru adalah menyesuaikan kebutuhan tiap daerah, dan juga permintaan guru yang mengajukan perpindahan kerja dari daerah tertentu menuju daerah lainya. Hal tersebut menyebabkan beberapa daerah mengalami penumpukan guru-guru dan ada beberapa daerah yang mengalami kekurangan guru. Permasalahan pendistribusian guru yang tidak merata akan menyebabkan kegagalan dalam melaksanakan pemerataan pendidikan.

Pendistribusian dan pemerataan guru di Kabupaten Sintang belum dilaksanakan efektif. Beberapa daerah kecamatan masih mengalami kekurangan guru, sedangkan untuk daerah perkotaan memiliki guru-guru yang berjumlah banyak, bahkan melebihi dari standar yang ditetapkan. Ada dua permasalahan yang menjadi permasalahan dalam pendistribusian guru, yaitu kekurangan dan ketidakmerataan. Pemerataan tenaga guru mengalami kendala dikarenakan data yang dilaporkan pada pemerintah daerah masih belum sesuai dengan keadaan lapangan, guru-guru yang telah memiliki NUPTK dianggap telah menjadi guru tetap, tetapi masih ada beberapa guru yang berstatus honorer ataupun tidak tetap serta ada beberapa guru yang memiliki NUPTK tetapi tidak memiliki mengajar ataupun sudah berhenti menjadi guru di sekolah. Guru-guru yang berada di perbatasan ataupun di pedalaman daerah merasakan ketidakadilan dan kesengajangan dengan daerah perkotaan, banyak guru yang meminta pindah tugaskan dan meninggalkan sekolah dengan kondisi kekurangan tenaga pendidik. Hal tersebut ditambah dengan guru-guru yang rekrut oleh pemerintah bukanlah berasal dari penduduk asli daerah, sehingga guru-guru tersebut meminta pemindahan agar sesuai dengan daerah asal mereka.

Analisis Anggaran Pendidikan Dasar Kabupaten Sintang

Supriadi (2003, p. 16) mengatakan bahwa pada tahun 1060-an dan 1970-an, isu-isu pemerataan kesempatan (*equality of opportunity*) melalui perluasan kesempatan belajar sangat dominan. Pada tahun 1980-an, isu-isu tentang keadilan (*equity*) dalam

memperoleh (sumber daya) pendidikan (dari pemerintah) menjadi tema sentral dengan fokus utama pada kelompok siswa yang kurang beruntung, dengan resiko berkurangnya perhatian pada kelompok yang beruntung.

Pembiayaan dan pendanaan pendidikan di Kabupaten Sintang telah berjalan dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan. Permasalahan pembiayaan pendidikan yang sering terjadi adalah penggunaan dana BOS. Dana BOS yang didapatkan masih dirasakan kurang efektif dan penggunaannya terbatas oleh aturan yang ada. Kondisi wilayah dan jumlah murid di sekolah merupakan hambatan yang membuat dana BOS menjadi tidak maksimal dikelola oleh sekolah.

Dana BOS sebagai alokasi pembiayaan pendidikan yang dikelola oleh daerah telah didistribusikan sesuai dengan aturan pemerintah. Sekolah-sekolah mempergunakannya dana BOS untuk memperlancar kegiatan operasional sekolah. Dana BOS mengalami permasalahan dikarenakan jumlah yang diambil harus sesuai dengan jumlah murid, hal tersebut merupakan kerugian bagi sekolah-sekolah yang mempunyai murid dengan jumlah yang sedikit. Pendistribusian dana BOS juga mengalami kendala dengan kondisi wilayah yang jauh, sehingga dana yang dikeluarkan untuk menyalurkan bantuan lebih besar daripada dana yang didapatkan oleh sekolah. Selain itu, pengelolaan dana BOS yang dibatasi oleh Juknis membuat sekolah merasakan kesulitan dalam mengelola anggaran yang akan digunakan dan penggunaan yang dialokasikan untuk membayar guru honor dirasakan masih kekurangan dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka berikut adalah simpulan yang dapat disampaikan.

Permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang meliputi: keadaan

geografi yang sulit dijangkau, motivasi mengikuti pendidikan yang belum maksimal, kualifikasi guru yang belum sesuai aturan, pendistribusian guru yang belum merata dan dana BOS yang belum memadai. Permasalahan pemerataan pendidikan yang utama adalah keadaan geografi dan pemerataan guru.

Pemerataan pendidikan menjadi terkendala dan tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan perhatian pemerintah terhadap kondisi pendidikan di wilayah yang jauh, yaitu di pedesaan, pedalaman dan di daerah perbatasan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan meliputi: mendirikan sekolah-sekolah di beberapa desa terpencil, membuat status khusus bagi sekolah yang jauh, mendirikan sekolah satu atap, dan mengadakan program guru kontrak.

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, penelitian ini memberikan saran sebagai berikut. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi wilayah dan geografi di Kabupaten Sintang. Pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk bekerja sama memberikan kontribusi dalam pengadaan transportasi ataupun perbaikan jalan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan di daerah. Selain itu, sekolah-sekolah jarak jauh ataupun sekolah satu atap juga diperbanyak agar masyarakat di daerah yang jauh juga dapat merasakan pendidikan.

Pemerintah juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengikuti pendidikan dasar dan memberikan bantuan dana pendidikan yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah daerah diharapkan memberikan kesempatan bagi pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi agar dapat mengikuti pendidikan kembali dan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pendidik untuk memperbaiki kualitasnya. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan untuk memantau keadaan sekolah serta memberikan data yang akurat tentang kekurangan guru di daerah serta membuat kebijakan yang tegas untuk tidak memin-

dahkan guru pada masa jabatan tertentu ataupun untuk kondisi tertentu. Dana BOS yang dialokasikan oleh pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan kondisi wilayah sekolah dan jumlah murid di sekolah. Sehingga sekolah-sekolah di pedalaman tidak merasakan kesenjangan ataupun ketidakadilan.

Daftar Pustaka

- Andi, T. N. (2013, September 1). Disdik Sintang: Ada BOS bukan berarti sekolah gratis. *AntaraNews.Com*. Retrieved from <http://www.antarakalbar.com/berita/315833/disdik-sintang-ada-bos-bukan-berarti-sekolah-gratis>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). *Prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang. (2013). *Kabupaten sintang dalam angka*. Sintang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang.
- Belcastro, A. T. (2015). Rebalancing quality education in a democratic society. *Creative Education*, 06(04), 428–439. <https://doi.org/10.4236/ce.2015.64043>
- Hammond, L. D., & Sykes, G. (1999). *Teaching as learning profession*. (L. D. Hammond & G. Sykes, Eds.). San Fransisco: Jossey-Bass.
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Holsinger, D. B., & Jacob, W. J. (2008). *Inequality in education: Comparative and international perspectives*. (D. B. Holsinger & W. J. Jacob, Eds.). Hong Kong: Comparative Education Research Centre.
- Kabupaten Sintang. (2010). *Rencana pembangunan jangka menengah kabupaten sintang*. Sintang: Kabupaten Sintang.
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat. (2013). *Profil pendidik dan tenaga kependidikan Kalimantan Barat*. Pontianak: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Barat.
- Levin, B. (2003). Approaches to equity in policy for lifelong learning. In *The Equity in Education Thematic Review*. Paris: OECD.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (2013).
- OECD. (2015). *Education in indonesia: Rising to challenge*. Paris: OECD Publishing.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Spradley, J. P. (2007). *Metode etnografi*. (M. Z. Elizabeth, Trans.). Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Supriadi, D. (2003). *Satuan biaya pendidikan dasar dan menengah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- UNESCO. (2005). *Decentralized education planning implementing national EFA plans*. UNESCO Asia Pacific Regional Bureau for Education.
- Voicu, M.-C. (2014). Using online questionnaires in the employee recruitment activity. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 124, 34–42. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.457>